

**Tantangan Pengelolaan Berkelanjutan terhadap Urbanisasi Wilayah
di Indonesia dan Implikasinya pada Pengembangan Kapasitas Pengelolaan
Pembangunan Perkotaan di Kota-kota Kecil dan Menengah**

Oleh : Fadjar Hari Mardiansjah¹

ABSTRAK

Pada paruh kedua dasa warsa 2000an, pembangunan perkotaan Indonesia telah memasuki suatu babak baru yang belum pernah dimiliki sebelumnya. Urbanisasi cepat yang terjadi di Indonesia telah membawa lebih dari setengah penduduk Indonesia bermukim di wilayah perkotaan, dimana hampir 70% penduduk perkotaan Indonesia tersebut bermukim di kota-kota kecil dan menengah yang setiap kotanya memiliki penduduk kurang dari 500 ribu jiwa. Di sisi lain, Deklarasi Rio tentang Pembangunan dan Berkelanjutan menghendaki dilakukannya suatu perubahan besar dalam pelaksanaan proses pembangunan dan pemanfaatan sumber-sumber daya lingkungan di setiap negara di dunia agar proses pembangunan dunia dapat diarahkan kepada suatu proses yang berkontribusi kepada berkelanjutan dunia. Sejak dideklarasikannya komitmen dunia pada Konferensi Dunia untuk Lingkungan dan Pembangunan tersebut, konsep pembangunan berkelanjutan telah menjadi suatu pedoman baru dalam setiap kegiatan pembangunan yang terus dikembangkan ke dalam setiap bidang pemikiran dan pelaksanaan pembangunan, termasuk dalam pembangunan perkotaan di Indonesia.

Berdasarkan pemahaman bahwa kota-kota kecil dan menengah akan memainkan peranan penting dalam membentuk masa depan perkotaan dan masa depan bangsa Indonesia, artikel ini ditujukan untuk melakukan elaborasi terhadap tantangan yang dihadapi dari berkembangnya fenomena tersebut. Penelusuran tersebut dilakukan dengan menggunakan kerangka pemikiran dari pembangunan berkelanjutan, dimana dalam konteks pembangunan wilayah dan kota, pada dasarnya kerangka pemikiran tersebut menawarkan suatu peluang besar dalam melakukan suatu pendekatan baru dalam pembangunan perkotaan.

Artikel ini menyimpulkan beberapa tantangan pembangunan perkotaan pada kota-kota kecil dan menengah yang sebagian besar merupakan kota-kota yang berada di wilayah kabupaten untuk kemudian dapat menjadi suatu bahan pemikiran bersama dalam melakukan pengelolaan pembangunan dan pengelolaan urbanisasi wilayah yang terkonsentrasi pada kota-kota kecil dan menengah di Indonesia tersebut.

Kata kunci: urbanisasi, kota kecil dan menengah, pembangunan kota berkelanjutan, pendidikan perencanaan, Indonesia.

¹ Fadjar Hari Mardiansjah adalah staf pengajar pada Jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia, dan pada saat ini tengah menempuh pendidikan doktorat pada l'Institut Français d'Urbanisme, l'École Doctorale Ville et Environnement, multi-Etablissement des l'École Nationale des Ponts et Chaussées, l'Université Paris VII et l'Université Marne-la-Vallée, Champs-sur-Marne, Paris, Prancis

Pendahuluan

Sejak dideklarasikannya Deklarasi Rio tentang Pembangunan Berkelanjutan dalam Konferensi PBB tentang Lingkungan dan Pembangunan, atau yang dikenal juga sebagai Pertemuan Bumi II di Rio de Janeiro pada tahun 1992 oleh sebagian besar negara yang tergabung di dalam PBB, termasuk Indonesia, dunia menghendaki dilakukannya suatu perubahan besar dalam pelaksanaan proses pembangunan di masing-masing negara. Deklarasi tersebut menegaskan pentingnya pelaksanaan konsep Pembangunan Berkelanjutan (*sustainable development*) demi keberlanjutan sejarah manusia di bumi, seperti yang dianjurkan oleh laporan dari Komisi Dunia untuk Lingkungan dan Pembangunan pada tahun 1987, yang juga dikenal sebagai Laporan Brundtland dengan judul '*Our Common Future*' dan telah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia dengan judul 'Hari Depan Kita Bersama'.

Laporan tersebut berpendapat bahwa terdapat peluang besar bahwa kehidupan di dunia tidak akan berlanjut apabila pola pembangunan, pemanfaatan dan pengelolaan terhadap sumber-sumber daya alam dan lingkungan yang dilakukan hingga pada saat itu tetap dilanjutkan. Oleh karena itu, Deklarasi Rio menghendaki adanya suatu kontribusi dari setiap negara dan setiap lokalitas, kepada pelaksanaan konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*), baik secara sendiri-sendiri dari setiap negara maupun secara bekerjasama antar negara ataupun dalam kerangka internasional yang lebih luas. Komitmen dunia untuk mengaplikasikan konsep pembangunan berkelanjutan tersebut, kemudian, memanggil banyak rangkaian diskusi, debat dan/atau pemikiran lainnya untuk menterjemahkan konsep pembangunan berkelanjutan yang masih bersifat utopis dan vague tersebut ke dalam suatu acuan praktis bagi setiap bidang pelaksanaan pembangunan.

Pembangunan wilayah dan kota, yang pada dasarnya merupakan suatu pendekatan geografis/spasial pada kegiatan pembangunan, merupakan salah satu bidang ilmu yang turut serta dalam mengelaborasi konsep utopis tersebut menjadi konsep yang praktis. Pendekatan spasial dalam pembangunan berpeluang besar untuk melakukan kontribusi terhadap pencapaian pelaksanaan konsep pembangunan berkelanjutan karena pendekatan tersebut memiliki beberapa kesamaan prinsip dengan konsep pembangunan berkelanjutan (Wilbanks, 1994). Thomas J. Wilbanks (1994) mengemukakan setidaknya terdapat empat alasan untuk hal itu. Pertama, kedua konsep tersebut memberi perhatian yang besar terhadap konsep kebutuhan (*needs*) yang sering kali diterjemahkan ke dalam kebutuhan dasar (*basic needs*) dari para penduduk beserta aktivitasnya. Kedua, kedua konsep tersebut juga memberi perhatian besar kepada pengalokasian optimal terhadap pemanfaatan sumber-sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam. Ketiga kedua konsep tersebut juga memberikan perhatian besar terhadap prinsip-prinsip integrasi baik terhadap integrasi spasial, integrasi aktivitas ekonomi dan integrasi sosial. Dan terakhir, konteks pendekatan pembangunan wilayah dan kota yang merupakan salah satu pendekatan geografis (spasial) dalam pembangunan, juga memiliki suatu karakteristik khusus penting yang berkesesuaian dengan konsep pembangunan berkelanjutan, yaitu perhatiannya kepada masa depan (*futurity*) yang menjadi elemen pemikiran dasar dari keduanya.

Sementara itu, secara internal, sejak awal abad ke-21 Indonesia memiliki beberapa kecenderungan penting yang membedakan paradigma dan tantangan pembangunannya, baik dalam pembangunan wilayah dan kota khususnya maupun dalam bidang pembangunan secara umum. Kecenderungan pertama yang menjadi tantangan pada pembangunan wilayah dan kota adalah telah berkembangnya fenomena urbanisasi wilayah yang juga terfokus pada banyak kota-kota kecil yang berada pada wilayah kabupaten. Tantangan kedua dilahirkan dari proses demokratisasi yang secara lebih luas mulai dijalankan sejak reformasi politik dan kebijakan desentralisasi yang dilakukan. Proses demokratisasi dan desentralisasi tersebut menghendaki

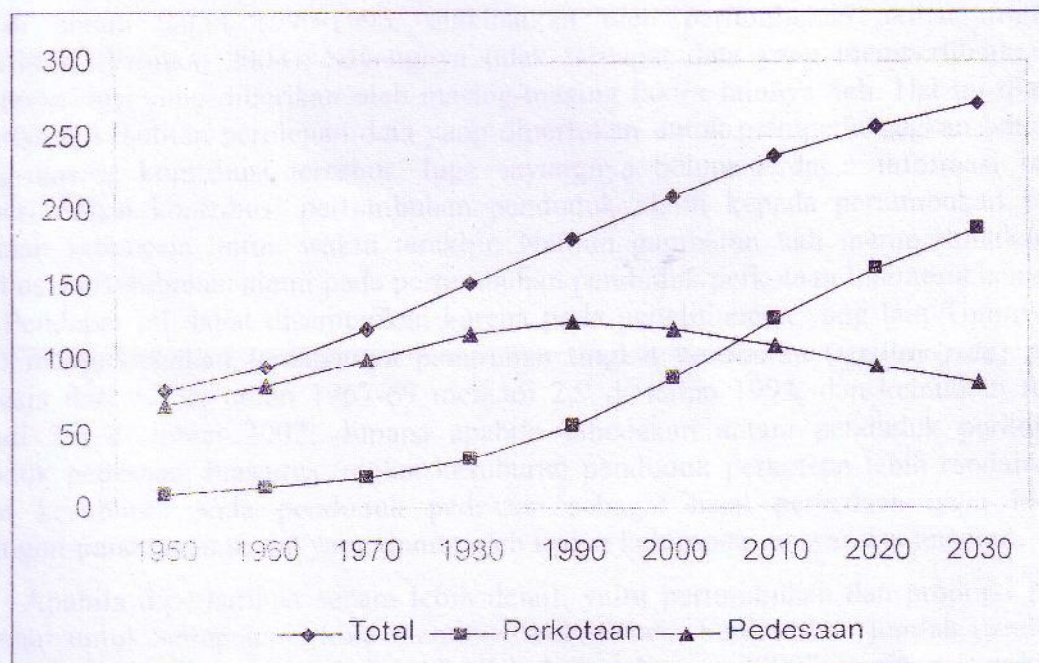
adanya proses yang lebih partisipatif dengan turut mengakomodasi kepentingan-kepentingan segenap pelaku dan stakeholder lainnya dalam pelaksanaan pembangunan yang dimulai dari proses perencanaannya hingga proses implementasi dan evaluasinya. Selain itu, kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah yang dilaksanakan sejak tahun 2000 memberikan tanggung jawab dan kewenangan pembangunan yang lebih besar kepada daerah kabupaten dan kota, untuk mengelola pemanfaatan dan pembangunan wilayahnya.

Bertolak dari pemikiran tersebut, tulisan ini bermaksud untuk melakukan elaborasi dan menganalisis tantangan pembangunan perkotaan di Indonesia, khususnya pada kota-kota kecil dan menengah yang berada pada wilayah kabupaten. Analisis dilakukan dengan pendekatan kualitatif yang didukung oleh penggunaan beberapa data dan informasi sekunder yang dapat dijangkau. Selanjutnya, tulisan ini berusaha menyimpulkan beberapa tantangan pembangunan perkotaan, khususnya pada kota-kota kecil dan menengah yang berada di wilayah kabupaten, untuk kemudian dapat menjadi suatu bahan pemikiran bersama dalam melakukan pengelolaan pembangunan perkotaan Indonesia di masa depan.

Prospek Urbanisasi pada Kota-kota Kecil dan Menengah Indonesia

Proses urbanisasi Indonesia yang terutama berlangsung sejak pertengahan abad ke-20 telah membawa Indonesia menjadi negara yang mayoritas penduduknya berada di wilayah perkotaan. Berdasarkan prediksi yang dilakukan oleh PBB (UN Population Division, 2007), sejak paruh kedua deka de tahun 2000an, diperkirakan bahwa untuk pertama kalinya Indonesia memiliki jumlah penduduk perkotaan yang lebih banyak daripada jumlah penduduk pedesaannya (lihat Gambar 1).

Gambar 1. Pertumbuhan Penduduk Perkotaan dan Pedesaan Indonesia antara tahun 1950-2030 (dalam juta jiwa)



Sumber : UN Population Division, 2007.

Keterangan : angka setelah tahun 2000 merupakan angka hasil prediksi.

Laporan dari UN Population Division (2007) yang berjudul *World Urbanization Prospect : the 2005 revision Population Database* (<http://esa.un.org>) mengemukakan bahwa jumlah penduduk perkotaan Indonesia akan meningkat dari 87,861 juta di tahun 2000 menjadi 144,416 juta di tahun 2015. Sementara itu, penduduk pedesaannya berkurang dari sekitar 121,3 juta jiwa di tahun 2000 menjadi sekitar 109,2 juta jiwa di tahun 2010, dan kembali akan berkurang menjadi 102,4 juta di tahun 2015.

Pertumbuhan penduduk perkotaan tersebut diakibatkan oleh tiga buah faktor, yaitu faktor pertumbuhan alami, pertumbuhan migrasi, dan faktor reklasifikasi. Faktor pertumbuhan alami yang merupakan selisih dari jumlah kelahiran dengan jumlah kematian. Sedangkan faktor pertumbuhan migrasi adalah hasil selisih dari migrasi masuk dengan migrasi keluar wilayah perkotaan. Sementara faktor reklasifikasi dapat didefinisikan sebagai penambahan penduduk perkotaan sebagai hasil dari perubahan status kawasan akibat perubahan kondisi kawasan tersebut dari kawasan non-perkotaan menjadi suatu kawasan perkotaan pada waktu berikutnya, dimana dengan demikian maka penduduk yang bermukim di kawasan tersebut berubah kategori menjadi penduduk perkotaan. Pada dasarnya, perubahan status kawasan menjadi kawasan perkotaan tersebut merupakan salah satu hasil dari pelaksanaan kegiatan pembangunan di kawasan tersebut. Berdasarkan karakteristik lokasinya, faktor reklasifikasi dapat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu reklasifikasi akibat perluasan/aneksasi suatu kota yang terjadi pada kawasan non-perkotaan di wilayah pinggiran dari sebuah kota utamanya, dan reklasifikasi yang terjadi sebagai akibat pemunculan suatu kota kecil sebagai akibat dari pertumbuhan dan perkembangan dari suatu kawasan pedesaan dan/atau pusat desa menjadi sebuah kawasan perkotaan dengan aktivitas yang semakin intensif dan beragam.

Tommy Firman (2004) mengemukakan bahwa hanya sekitar 35,2% pertumbuhan penduduk perkotaan antara tahun 1980 ke 1985 yang diakibatkan oleh pertumbuhan alami. Estimasi lainnya untuk antara tahun 1990-1995, memperlihatkan bahwa pertumbuhan alami hanya memberi kontribusi sebesar 37% kepada pertumbuhan penduduk perkotaan Indonesia (Firman, 2004). Sementara itu, sisanya, yaitu sebesar 64,8% di antara tahun 1980-1985 dan 63% di antara tahun 1990-1995, diakibatkan oleh pertumbuhan akibat migrasi dan reklasifikasi (Firman, 2004). Sayangnya tidak terdapat data yang memperlihatkan berapa besar kontribusi yang diberikan oleh masing-masing faktor lainnya tadi. Hal ini diakibatkan oleh adanya kesulitan perolehan data yang diperlukan untuk memperhitungkan berapa besar masing-masing kontribusi tersebut. Juga sayangnya belum terdapat informasi lain yang memperlihatkan kontribusi pertumbuhan penduduk alami kepada pertumbuhan penduduk perkotaan Indonesia untuk waktu terakhir. Namun gambaran tadi memperlihatkan bahwa kontribusi pertumbuhan alami pada pertumbuhan penduduk perkotaan Indonesia hanya sekitar 35%. Pendapat ini dapat disampaikan karena pada penelitiannya yang lain Tommy Firman (2003) mengemukakan terdapatnya penurunan tingkat kesuburan (*fertility rate*) penduduk Indonesia dari 5,7 di tahun 1967-69 menjadi 2,9 di tahun 1994, dan kemudian turun lagi menjadi 2,6 di tahun 2002, dimana apabila dibedakan antara penduduk perkotaan dan penduduk pedesaan, biasanya tingkat kesuburan penduduk perkotaan lebih rendah daripada tingkat kesuburan pada penduduk pedesaan sebagai hasil perbedaan gaya hidup dan pandangan-pandangan sosial yang dianut oleh kedua kelompok masyarakat tersebut.

Apabila diperhatikan secara lebih detail, yaitu pertumbuhan dan proporsi penduduk perkotaan untuk setiap jenis kota menurut tipologi kota berdasarkan jumlah penduduk per kota, seperti yang dikemukakan oleh UN Population division (2007), maka pertumbuhan dan penambahan absolut penduduk perkotaan Indonesia telah terjadi secara sangat tinggi pada kota-kota kecil dan menengah yang memiliki penduduk kurang dari 500.000 jiwa untuk tiap kotanya. Laporan dari UN Population Division (2007) mengemukakan bahwa jumlah penduduk kota-kota tersebut di Indonesia akan bertambah dari 60,2 juta di tahun 2000

menjadi 98,6 juta di tahun 2015. Padahal di tahun 1980, hanya terdapat kurang dari 20 juta penduduk untuk jenis kota tersebut (lihat Tabel 1). Diperkirakan angka ini akan terus membesar dengan terus berkembangnya jumlah penduduk perkotaan di Indonesia (lihat Gambar 2). Informasi tersebut memperlihatkan, disamping terjadi suatu ledakan penduduk pada kota yang berpenduduk 10 juta lebih (Jakarta dan sekitarnya, atau Jabodetabek yang telah menjadi suatu aglomerasi perkotaan yang masif), “ledakan” jumlah penduduk perkotaan juga terjadi pada kota-kota kecil dan menengah yang masing-masing kota berpenduduk kurang dari 500 ribu jiwa. Dengan kondisi besarnya jumlah penduduk perkotaan Indonesia yang bermukim di wilayahnya serta pertumbuhan dan pertambahan penduduknya, maka kota-kota kecil dan menengah Indonesia akan memiliki peran penting dalam membangun masa depan bangsa Indonesia, terutama dalam pembentukan masa depan perkotaan Indonesia.

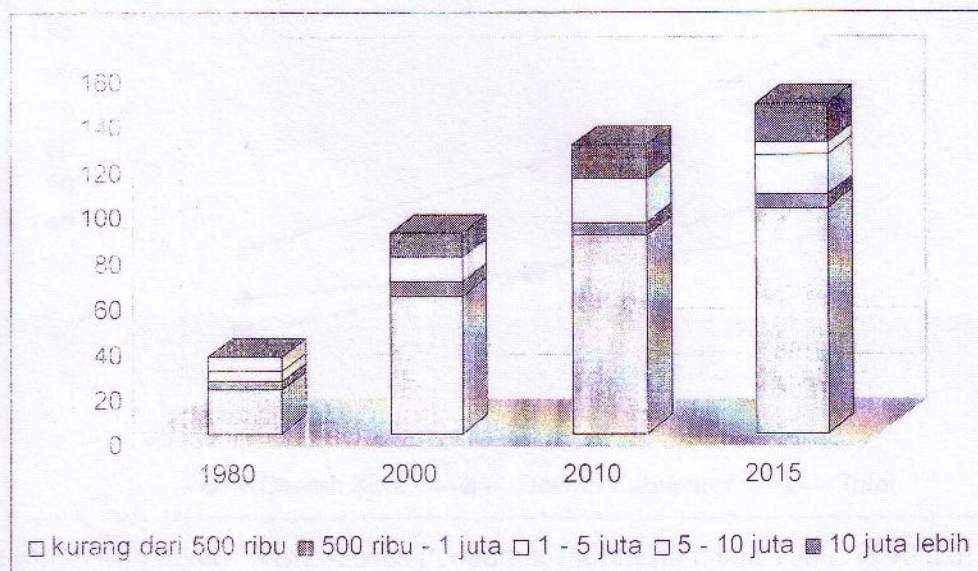
Tabel 1. Jumlah dan Proporsi Penduduk Perkotaan Indonesia per Tipe Jenis Kota Tahun 1980, 2000, 2010 dan 2015 (dalam juta jiwa)

Kategori Kota	1980		2000		2010		2015	
	(juta jiwa)	(%)	(juta jiwa)	(%)	(juta jiwa)	(%)	(juta jiwa)	(%)
kurang dari 500 ribu	19,191	57.9	60,194	68.5	86,483	68.3	98,607	68.3
500 ribu - 1 juta	3,255	9.8	6,171	7.0	6,051	4.8	5,810	4.0
1 - 5 juta	4,742	14.3	10,431	11.9	18,830	14.9	17,839	12.4
5 - 10 juta	5,984	18.0	0	0.0	0	0.0	5,338	3.7
lebih dari 10 juta	0	0.0	11,065	12.6	15,206	12.0	16,822	11.6
Total	33,172	100.0	87,861	100.0	126,570	100.0	144,416	100.0

Sumber data : UN Population Division, 2007.

Keterangan: angka setelah tahun 2000 merupakan angka hasil prediksi

Gambar 2. Pertumbuhan Penduduk Perkotaan Indonesia per Jenis Kota Tahun 1980, 2000, 2010 dan 2015 (dalam juta jiwa)



Sumber data: UN Population Division, 2007.

Keterangan: angka setelah tahun 2000 merupakan angka hasil prediksi.

Selain itu, seperti yang dapat disaksikan pada Tabel 2, hal lain yang menarik adalah, hasil Sensus Penduduk Indonesia pada tiga kali terakhir memperlihatkan bahwa jumlah penduduk perkotaan Indonesia semakin didominasi oleh mereka yang bertempat tinggal pada wilayah kabupaten, yang notabene merupakan wilayah-wilayah non-urban pada sistem pembagian wilayah di Indonesia. Sementara itu, dari 63 buah daerah kota, termasuk DKI Jakarta, yang telah ada di tahun 2000, hanya 10 buah kota yang berpenduduk lebih dari 1 juta jiwa, dan 8 kota serta 38 buah kota lainnya yang secara berurutan memiliki penduduk antara 500ribu – satu juta atau antara 100ribu – 500ribu jiwa. Dengan demikian, hanya 56 buah daerah kota Indonesia di tahun 2000 yang setiap kotanya memiliki penduduk di atas 100 ribu jiwa, dengan jumlah penduduknya sebesar 37,1 juta jiwa. Namun, jumlah absolut dari penduduk perkotaan yang bermukim di kota-kota kecil dan menengah di wilayah kabupaten mencapai lebih dari 50 juta jiwa.

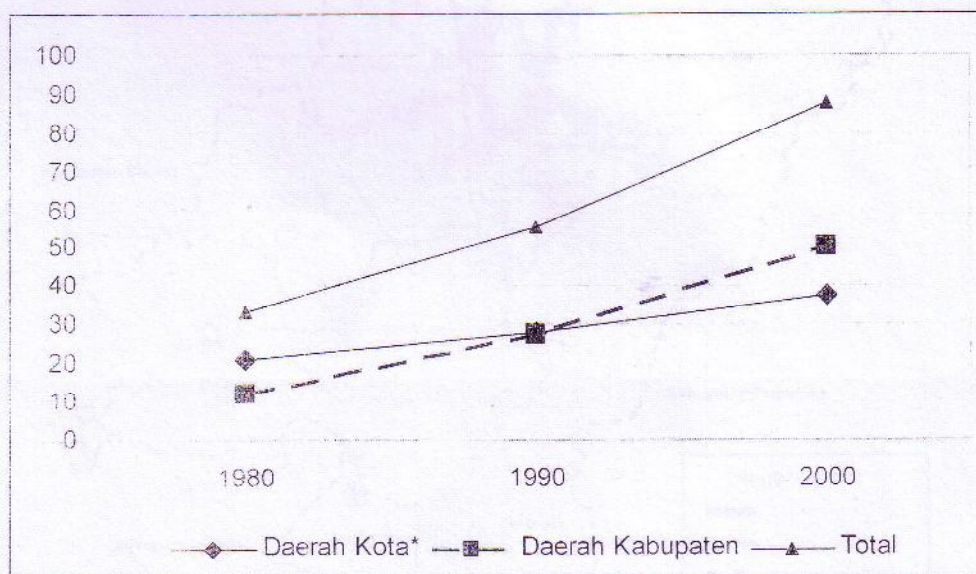
Tabel 2. Jumlah dan Perkembangan Penduduk Perkotaan Indonesia di Daerah Kota dan Kabupaten Tahun 1980, 2000, 2010 dan 2015 (dalam juta jiwa)

	Tahun		
	1980	1990	2000
Daerah Kota*	21,032	27,931	37,518
Daerah Kabupaten	12,140	27,554	50,343
Total	33,172	55,485	87,861

Sumber: diolah dari hasil Sensus Penduduk Indonesia tahun 1980, 1990 dan 2000.

Keterangan: * termasuk penduduk perkotaan di Propinsi DKI Jakarta.

Gambar 2. Pertumbuhan Penduduk Perkotaan Indonesia dan Perbandingannya pada Daerah Kota dan Daerah Kabupaten, Tahun 1980, 1990, dan 2000 (dalam juta jiwa)



Sumber: diolah dari hasil Sensus Penduduk Indonesia tahun 1980, 1990 dan 2000.

Keterangan: * termasuk penduduk perkotaan di Propinsi DKI Jakarta.

Salah satu contoh dari wilayah kabupaten yang terurbanisasi dengan cukup tinggi adalah Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Perkembangan wilayah perkotaan di kabupaten tersebut cenderung meluas dan menghasilkan lebih dari 10 buah wilayah kota (lihat Gambar

Tabel 3. Perkembangan Penduduk Perkotaan Kabupaten Tegal dan Perbandingannya dengan Kota Tegal, Tahun 1961-2000

	Kota Tegal		Kabupaten Tegal		Total
		urban	rural		
<i>Populasi</i>					
Tahun 1961	89 016	na	na		764 285
Tahun 1971	105 752	na	na		865 641
Tahun 1980	131 440	262 375	837 562		1 099 937
Tahun 1990	229 713	494 077	745 274		1 239 351
Tahun 2000	236 900	755 651	626 764		1 382 435
<i>Pertumbuhan Penduduk Rata-rata (dalam % per tahun)</i>					
1961-1971	1,74	na	na		1,25
1971-1980	2,45	na	na		2,70
1980-1990	5,74	6,53	-1,16		1,20
1990-2000	0,31	4,34	-1,72		1,10
<i>Pertumbuhan absolut (jiwa)</i>					
1961-1971	16 736	na	na		101 356
1971-1980	25 688	na	na		234 296
1980-1990	98 273	231 702	-92 288		139 414
1990-2000	7 187	261 574	-118 490		143 084

Sumber : dihitung berdasarkan data BPS dari hasil Sensus Penduduk Indonesia Tahun 1961, 1971, 1980, 1990 et 2000.

Tabel 4. Wilayah Perkotaan di Kabupaten Tegal dan Perbandingannya Perkembangan Jumlah Desa dan Penduduknya, Tahun 1990-2000

No	Wilayah Perkotaan Tahun 2000			Wilayah Perkotaan Tahun 1990			
	Wil-Perkot	Jumlah Desa	Jumlah Penduduk	No	Wil-Perkot	Jumlah Desa	Jumlah Penduduk
1	DTA	52	266 791	1	DTA	43	220 323
2	SPD	43	211 443	2	SP*	27	131 082
3				3	Tonggara*	1	4 131
4	Kramat	11	49 853	4	Kramat	8	30 007
5	Margasari	1	32 515	5	Margasari	1	11 188
6	Banjar Anyar	1	32 495	6	Banjar Anyar	1	6 936
7	Lebaksiu	5	31 291	7	Lebaksiu	3	24 390
8	Tarub	7	25 475	8	Tarub	2	10 309
9	Balapulang	3	21 592	9	Balapulang	2	17 655
10	Prupuk	2	14 111	10	Prupuk	2	12 825
11	Bumijawa	1	9 504	11	Bumijawa	1	8 842
12	Bojong	2	9 103	12	Bojong	1	6 125
13	Jejeg	1	4 973	13	Jejeg	1	4 650
14	Jatinegara	1	2 594	14	Jatinegara	1	2 368
15	Suradadi	2	19 431				
16	Pagerbarang	1	6 735				
17	Rembul	1	6 307				
18	Cerih	1	4 656				

Sumber : Diolah dari data hasil Sensus Penduduk tahun 1990 dan 2000.

Keterangan : DTA = Dukuhhuri-Talang-Adiwerna

SPD = Slawi-Pangkaj-Dukuhwaru

SP = Slawi-Pangkaj

* Wilayah Perkotaan Tonggara teragglomerasi ke dalam Wilayah Perkotaan SPD.

Suatu hal yang menarik adalah, sebagai salah satu hasil dari proses urbanisasi di wilayah Kabupaten Tegal, hingga saat ini, terbentuk lebih dari 10 buah wilayah perkotaan dengan jumlah penduduk perkotaan yang bervariasi. Dua wilayah perkotaan yang memiliki jumlah penduduk yang cukup besar adalah Wilayah Perkotaan Dukuhturi-Talang Adiwerna dengan jumlah penduduk perkotaan sekitar 266 ribu jiwa di tahun 2000, Slawi-Pangkah-Dukuhwaru (sekitar 211 ribu jiwa). Sementara itu juga terdapat 5 buah wilayah perkotaan "kota kecil" (Kramat, Margasari, Lebaksiu, Tarub, dan Balapulang) yang berpenduduk antara 20 ribu – 50 ribu jiwa untuk setiap kotanya, dan 7 buah wilayah perkotaan yang lebih kecil dengan jumlah penduduk di bawah 25 ribu jiwa per kota di tahun 2000.

Jumlah penduduk perkotaan di kedua wilayah perkotaan terbesar tersebut tidak jauh berbeda dengan jumlah penduduk perkotaan di Kota Tegal pada tahun yang sama. Bahkan, WP Dukuhturi-Talang Adiwerna memiliki jumlah penduduk yang lebih besar daripada Kota Tegal, dan karena laju pertumbuhannya lebih tinggi maka bukan hal yang tidak mungkin maka jumlah penduduk perkotaan di WP Slawi-Pangkah-Dukuhwaru akan melampaui jumlah penduduk Kota Tegal. Padahal, tidak seperti Kota Tegal yang memiliki institusi pengelolaan pembangunan perkotaan yang spesifik berkonsentrasi kepada pengelolaan pembangunan perkotaan di Kota Tegal, kedua wilayah perkotaan ini, seperti halnya wilayah-wilayah perkotaan lain di Kabupaten Tegal dan di kabupaten-kabupaten lainnya di Indonesia, tidak memiliki institusi pengelolaan pembangunan perkotaan yang spesifik berkonsentrasi kepada pembangunan perkotaan di wilayahnya.

Tantangan Pengelolaan Pembangunan Perkotaan pada Kota-kota Kecil dan Menengah di Wilayah Kabupaten

Dari elaborasi di atas, tampak bahwa perkembangan penduduk perkotaan yang bermukim di kota-kota kecil dan menengah, terutama yang berlokasi di wilayah kabupaten, bukan merupakan suatu hal yang dapat diabaikan begitu saja. Penduduk perkotaan yang bermukim di kota-kota kecil dan menengah di wilayah kabupaten ini meledak dengan begitu pesat, dan dalam jumlah dan proporsi yang sangat besar. Baik buruknya pengelolaan pembangunan perkotaan pada kota-kota kecil dan menengah di wilayah kabupaten ini, akan sangat mempengaruhi baik buruknya "wajah perkotaan" di Indonesia. Dengan demikian, maka masa depan penduduk kota-kota kecil dan menengah tersebut akan sangat menentukan masa depan penduduk perkotaan Indonesia.

Sayangnya tidak terdapat data akurat tentang berapa jumlah kota-kota kecil dan menengah yang berlokasi di wilayah kabupaten seperti itu, sehingga untuk mengetahui berapa jumlah kota-kota kecil dan menengah tersebut harus dilakukan suatu analisis tersendiri dengan menganalisis setiap kabupaten yang ada. Namun, dengan mengasumsikan bahwa banyak di antara kota-kota tersebut merupakan kota-kota kecil dengan jumlah penduduk kurang dari 200 ribu untuk tiap kotanya karena hingga saat ini hanya sedikit kota di Indonesia yang memiliki penduduk di antara 200-500 ribu dan/atau lebih, maka dapat diperkirakan bahwa terdapat ratusan buah kota kecil yang menjadi hunian utama dari penduduk perkotaan Indonesia di masa depan, yang jumlahnya akan semakin meningkat dengan meningkatnya pembangunan wilayah dan meningkatnya jumlah penduduk perkotaan di Indonesia. Apabila angka acuan tersebut diperkecil menjadi kurang dari 100 ribu penduduk, maka jumlah kota-kota tadi akan semakin menggelembung, dan demikian seterusnya.

Selain itu, juga sayangnya, juga belum terdapat informasi yang cukup akurat tentang jumlah dan laju pertumbuhan penduduk perkotaan di tiap-tiap kota kecil dan menengah tersebut, sehingga untuk mengetahuinya juga harus dilakukan analisis untuk tiap kabupaten.. Namun dengan melihat pengalamannya Kabupaten Tegal dan di Propinsi Jawa Tengah yang

pertumbuhan penduduk perkotaan kabupatennya yang cukup tinggi, yaitu 5,67% per tahun pada antara tahun 1990-2000 dan hampir mencapai 6% per tahun di antara tahun 1980-200, yang jauh lebih tinggi daripada pertumbuhannya di seluruh daerah kota yang hanya sekitar 1,41% per tahun untuk tahun 1990-200 dan selalu kurang dari 2% per tahun antara tahun 1980-2000, maka dapat diperkirakan bahwa tidak sedikit dari kota-kota kecil dan menengah yang memiliki pertumbuhan penduduk perkotaan yang sangat tinggi sebagai akibat pertumbuhan penduduk alami, migrasi, perluasan wilayah kota dan/atau reklasifikasi wilayah perkotaan.

Padahal kota-kota kecil dan menengah yang berlokasi di wilayah tersebut bukanlah kota-kota yang memiliki institusi pengelolaan pembangunannya masing-masing. Hal ini karena hanya kota-kota tersebut merupakan kota-kota yang berada di dalam otoritas dan kewenangan kabupaten, sehingga institusi pengelolaan pembangunannya berada di dalam level kabupaten yang merupakan wilayah atasan dari kota-kota kecil dan menengah tersebut. Akibatnya, pengelolaan pembangunan perkotaan yang terjadi pada kota-kota kecil dan menengah tadi bergantung kepada aktivitas yang dilakukan oleh institusi yang berada pada level kabupaten, yang umumnya tidak mampu untuk berkonsentrasi kepada setiap kotanya. Bahkan, berdasarkan interview yang dilakukan terhadap beberapa buah kabupaten, terdapat suatu indikasi yang kuat dimana institusi pengelolaan dan pembangunan Pemerintah Kabupaten memberikan prioritas yang lebih tinggi kepada kota yang menjadi ibukota kabupaten ketimbang kota-kota lainnya, walaupun ibukota kabupaten tersebut bukan merupakan pusat aktivitas ekonomi di wilayahnya.

Kondisi ini menimbulkan suatu tantangan tersendiri di dalam proses pengelolaan pembangunan, karena pengalamannya memperlihatkan bahwa implikasi pertumbuhan penduduk perkotaan terhadap pembangunan dan penyediaan infrastruktur dan fasilitas pelayanan perkotaan serta pengelolaan pembangunan dan lingkungan perkotaan sangat besar, sehingga belum terdapat satu kota pun di Indonesia yang mampu melakukannya secara memuaskan. Tantangan tersebut diperbesar oleh terbatasnya kapasitas institusi dari banyak daerah kabupaten dan kota di Indonesia dalam melakukan pengelolaan pembangunan perkotaan dan/atau pembangunan dan penyediaan infrastruktur dan fasilitas pelayanan perkotaan.

Walaupun jumlah penduduk untuk tiap kotanya relatif kecil bila dibandingkan dengan jumlah penduduk di kota-kota utama Indonesia, namun angka-angka yang tersebut di dalam Tabel 1 sebagai jumlah penduduk kota-kota dengan penduduk kurang dari 500.000 jiwa mengindikasikan bahwa proses urbanisasi yang terjadi di kota-kota kecil dan menengah di Indonesia telah terjadi dengan laju pertumbuhan yang sangat pesat. Barney Cohen (2006) mengemukakan bahwa pertumbuhan perkotaan yang cepat banyak membawa persoalan pelik pada sebagian besar kota di negara berkembang sebagai akibat terbatasnya kemampuan setiap kota dalam memenuhi kebutuhan pelayanan dasar perkotaan warganya yang jumlahnya berkembang dengan pesat. Oleh karena itu, apabila fenomena ini tidak segera diantisipasi, maka dikhawatirkan bahwa bencana-bencana perkotaan baik yang berupa bencana lingkungan, bencana sosial, bencana kesehatan maupun kemiskinan yang banyak terjadi pada kota-kota besar dan metropolitan pada saat ini, seperti banjir, kekurangan sediaan air bersih, meluasnya penyebaran penyakit menular, disintegrasi sosial, dan lain sebagainya, juga akan terjadi di kota-kota kecil dan menengah walaupun dalam besaran dan intensitas yang lebih kecil. Bahkan, karena sebagian besar kota-kota kecil dan menengah tersebut berada di wilayah pertanian yang sangat tergantung kepada kualitas lingkungan alam sekitar dan/atau wilayah atasannya, maka bukan hal yang tidak mungkin bencana-bencana perkotaan tersebut akan mempengaruhi kegiatan dan perkembangan di wilayah sekitarnya. Apabila hal ini terjadi maka, dalam jangka pendek bencana-bencana tersebut akan berpengaruh terhadap kualitas

hidup dari warga kota, dan dalam jangka panjang hal itu akan menjadi salah satu penghalang bagi pembangunan ekonomi dan wilayah di Indonesia.

Pada suatu sisi, sebagai bagian dari kota, yang merupakan tempat yang menawarkan peluang-peluang pembangunan ekonomi, sosial dan budaya, kota-kota kecil dan menengah juga berpeluang menjadi titik sentral bagi pengembangan dan pertumbuhan ekonomi, serta pengembangan ilmu pengetahuan dan budaya, peningkatan inovasi, penciptaan peluang kerja, dan lain sebagainya (Cohen, 2006). Dalam konteks ini, kota merupakan suatu tempat penting yang berfungsi untuk meningkatkan kualitas kehidupan warganya, termasuk dalam meningkatkan kualitas proses produksi dari aktivitas-aktivitas ekonomi warganya serta penduduk di sekitarnya yang merupakan aktivitas pertanian. Selain itu, pemusatan kegiatan pada suatu wilayah kota yang memiliki kepadatannya yang lebih tinggi dari wilayah di sekitarnya, mungkin merupakan suatu hal yang bagus apabila ditinjau dari sudut pandang upaya meminimalisir dampak aktivitas manusia kepada lingkungan ekosistem setempat (Cohen, 2006). Hal ini disebabkan karena dengan pemadatan aktivitas tersebut maka upaya mitigasi/penanggulangan dampaknya bisa dilakukan secara lebih efektif dan lebih efisien pada suatu skala ekonomi yang mencukupi, walaupun semakin berkembangnya sebuah kota, maka upaya pengelolaan aktivitas dan pembangunannya akan menjadi semakin kompleks. Beberapa hal yang menjadi perlu mendapat perhatian penting di dalamnya adalah penyediaan sarana dan prasarana dasar perkotaan bagi warga kota seperti perumahan, air bersih, sanitasi, listrik, dan lain-lain, serta perhatian terhadap pencegahan bencana perkotaan baik merupakan bencana lingkungan seperti banjir, longsor dan sebagainya maupun bencana kesehatan yang diakibatkan oleh penyebaran penyakit menular seperti demam berdarah, muntaber, flu burung dan lain sebagainya.

Pada sisi yang lain, selain memiliki peran untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup warganya, kota-kota kecil dan menengah tersebut juga berfungsi dalam meningkatkan kualitas pembangunan pedesaan dan pembangunan wilayah di sekitarnya (Rondinelli, 1986). Fungsi tersebut dilakukan dengan menjadikan kota-kota kecil dan menengah tersebut mampu berperan dalam melakukan penyediaan dan dukungan penyediaan pelayanan, fasilitas dan kebutuhan-kebutuhan pendukung aktivitas produktif bagi wilayah di sekitarnya. Dalam konteks pengembangan kegiatan pertanian yang merupakan kegiatan penting di wilayah-wilayah kabupaten, kota-kota kecil dan menengah dapat berperan dalam mengembangkan kegiatan industri kecil dan menengah yang mengolah hasil-hasil pertanian di pedesaan dan wilayah sekitarnya, serta memberikan pelayanan pendukung kegiatan pertanian di wilayah sekitarnya, dan menyediakan akses pasar bagi barang-barang hasil pertanian (Rondinelli, 1986). Dari sudut pandang pembangunan sosial dan budaya, kota-kota kecil dan menengah dapat berfungsi sebagai pusat-pusat pelayanan pendidikan, kesehatan, dan peningkatan kapasitas teknik vokasional dari penduduk dan tenaga kerja yang bermukim di dalamnya serta di wilayah sekitarnya. Dengan demikian, dengan memandang keterkaitan dan interaksi antar-kota serta antara kota dengan wilayah di sekitarnya, maka kota-kota kecil dan menengah di wilayah kabupaten juga berfungsi sebagai penguat jejaring aktivitas sosial, ekonomi dan budaya sehingga dengan demikian maka kota-kota tersebut juga berfungsi sebagai tempat penyebaran kesejahteraan bagi kelompok masyarakat lain yang tidak tinggal di dalam wilayah kota tersebut.

Apabila hal itu dapat diperkuat secara efektif, maka dari sudut pandang demografis, kota-kota kecil dan menengah dapat berperan sebagai penyangga dari kota-kota metropolitan dan kota-kota besar lainnya, dalam bentuk menyerap dan menyediakan ruang ekonomi bagi penduduk di wilayah sekitarnya sehingga tidak bermigrasi ke kota-kota besar (Cohen, 2006). Untuk mampu memenuhi peran-peran tersebut, maka kota-kota kecil dan menengah tidak hanya perlu dikembangkan agar memiliki jaringan jalan regional yang menghubungkannya

intensif. Terlebih bila terjadi suatu bias perhatian pembangunan di dalam institusi pengelolaan pembangunan kota yang tidak menempatkan permasalahan pembangunan perkotaan di kabupatennya ke dalam prioritas perhatian yang memadai, atau bias perhatian yang lebih menempatkan perhatian kepada permasalahan-permasalahan pembangunan perkotaan di wilayah ibukota kabupaten lebih tinggi daripada permasalahan-permasalahan lainnya, seperti yang sering terjadi di banyak pengalaman pengelolaan pembangunan kabupaten di Indonesia. Oleh karena itu, tantangan pengembangan dan penguatan kewenangan dan kemampuan dari institusi di setiap kota kecil di bawah level kabupaten ini menjadi suatu tantangan institusional dalam pembangunan kota-kota kecil ini.

Selanjutnya, iklim demokrasi dan kesadaran bahwa aktor-aktor kunci dari pelaksanaan pembangunan di setiap kota kecil tadi bukan hanya berasal dari lingkungan wilayah kotanya saja melainkan juga berasal dari wilayah-wilayah lain dari level pedesaan di sekitar kota kecil tersebut, wilayah lain pada level kota-kota kecil lainnya, level kabupaten atau kabupaten lainnya, hingga pada level nasional atau bahkan internasional, dan kesadaran bahwa potensi dan sumber-sumber daya pembangunan yang tidak hanya terletak pada institusi pemerintah, melainkan lebih banyak terdapat pada institusi swasta dan organisasi non-pemerintah (LSM dan KSM), maka tantangan pengembangan institusi dan pengelolaan pembangunan yang partisipatif (*participatory governance*) menjadi tantangan lain dalam pengembangan institusi pengelolaan pembangunan perkotaan di kota-kota kecil dan menengah tersebut. Tanpa memperhatikan seluruh tantangan ini, dikhawatirkan bahwa pengalaman-pengalaman buruk yang terjadi pada urbanisasi di wilayah kota-kota besar dapat terreplikasi di wilayah kota-kota kecil ini walau dalam ukuran dan intensitas yang lebih rendah, dan kota-kota kecil dan menengah akan kehilangan potensinya sebagai salah satu aktor penting dalam pembangunan ekonomi wilayah dan pengentasan kemiskinan baik di wilayah kotanya maupun di wilayah pedesaan sekitarnya.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Dari pembahasan di atas, dapat ditarik beberapa kesimpulan yang berkaitan dengan pertumbuhan penduduk perkotaan di Indonesia. Kesimpulan pertama adalah bahwa pertumbuhan penduduk perkotaan di Indonesia telah membawa pada suatu kondisi dimana urbanisasi tidak hanya terjadi secara masif pada kota-kota besar utama Indonesia seperti Jakarta (Jabodetabek), Bandung, dan Surabaya, namun juga terjadi secara besar-besaran pada kota-kota kecil dan menengah yang berlokasi di wilayah kabupaten. Bahkan, proses urbanisasi di wilayah kabupaten ini, diprediksikan, merupakan proses urbanisasi yang mengikutsertakan bagian terbanyak dari penduduk perkotaan Indonesia, baik di saat ini maupun di masa depan. Namun, proses urbanisasi yang terjadi di wilayah kabupaten tidak terkonsentrasi pada satu wilayah aglomerasi perkotaan saja melainkan pada beberapa wilayah aglomerasi perkotaan yang terjadi secara bersamaan.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka peningkatan dan penguatan kapasitas pengelolaan pembangunan kota, khususnya yang spesifik untuk kota-kota kecil dan menengah di wilayah kabupaten seperti ini perlu segera dilakukan agar proses urbanisasi yang terjadi di kota-kota tersebut tidak akan mengulangi cerita buruk dari proses urbanisasi yang telah terjadi di kota-kota besar sebelumnya, yang banyak menimbulkan berbagai permasalahan ekonomi dan sosial seperti pengangguran, kemiskinan, degradasi lingkungan hidup dan bencana-bencana lingkungan dan/atau kesehatan. Selain itu, peningkatan kemampuan dan kapasitas pengelolaan pembangunan tersebut juga perlu dilakukan agar kota-kota kecil dan menengah, yang umumnya berlokasi di antara kawasan-kawasan pertanian, mampu menjadi elemen-elemen mediasi bagi kawasan-kawasan pedesaan di sekitarnya kepada kota-kota besar/utama

kepada kota-kota besar yang berfungsi sebagai pasar dari produk-produk wilayah sekitarnya, namun juga perlu memiliki jaringan jalan dan jaringan infrastruktur komunikasi lain yang mampu membangun suatu keterkaitan dan hubungan yang kuat di antara kota-kota kecil tersebut dengan wilayah-wilayah pedesaan di sekitarnya. Selain itu, juga perlu dikembangkan jaringan infrastruktur fisik dan layanan-layanan lain yang mampu mendukung pengembangan industri pengolahan kecil dan menengah, fungsi-fungsi pendukung kegiatan pertanian dan aktivitas produksi lain di wilayah sekitarnya, fasilitas-fasilitas pemasaran produk pertanian, serta fasilitas pelayanan sosial seperti pendidikan, kesehatan dan informasi. Dengan demikian, maka dalam konteks ini, diharapkan bahwa kota-kota kecil dan menengah di Indonesia dapat memainkan peranan penting dalam mendukung pengembangan kegiatan pertanian, pembangunan pedesaan dan pengembangan wilayah, serta melakukan penyediaan akses pasar dan pengembangan kegiatan industri kecil dan menengah pengolahan hasil pertanian, dan pengembangan kegiatan sosial dan budaya bagi masyarakat yang tinggal di dalamnya serta di wilayah sekitarnya.

Persoalan lain yang juga perlu mendapat perhatian adalah kemampuan kota dalam menciptakan kesempatan kerja yang mampu mendukung kehidupan warga kota untuk hidup secara layak, perlindungan terhadap kondisi dan kualitas lingkungan, pemeliharaan sumber daya alam perkotaan, dan penciptaan kohesi ekonomi dan sosial baik di antara masyarakat perkotaan maupun dengan masyarakat pedesaan di sekitarnya. Rendahnya kemampuan teknik dan otoritas dari institusi pengelolaan pembangunan kota, serta kemampuan finansial dan sumber daya manusia bila dibandingkan dengan kebutuhannya, banyak membuat kota-kota di negara berkembang, termasuk Indonesia, menghadapi banyak persoalan penting seperti pengangguran, kemiskinan, berkembangnya permukiman kumuh, kemacetan dan tidak terkendalinya pertumbuhan kota, degradasi lingkungan hidup perkotaan, dan ketidak-serasian pertumbuhan kota dengan aktivitas masyarakat di wilayah sekitarnya, yang banyak dipengaruhi oleh ketidak-mampuan institusi pengelolaan pembangunan kota dalam penyediaan infrastruktur dan fasilitas pelayanan kota, serta mengarahkan pertumbuhan dan pembangunan kotanya. Dalam konteks ini, integrasi wilayah antara kota-kota kecil dan menengah dengan wilayah pedesaan di sekitarnya memberikan peran penting kepada kota-kota kecil dan menengah dalam pengentasan kemiskinan, yang tidak saja kemiskinan yang terjadi di wilayahnya, namun juga di wilayah pedesaan di sekitarnya.

Oleh karena itu, perhatian terhadap peningkatan dan pengembangan kapasitas institusi pembangunan kota, baik pada level kota-kota kecil tersebut maupun pada level kabupaten yang menaunginya menjadi suatu hal yang penting dalam pengembangan kota-kota kecil seperti itu. Di sisi lain, Kebijakan Desentralisasi dan Otonomi Daerah yang dilancarkan dengan diberlakukannya UU No. 22/1999 yang kemudian direvisi oleh UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang memberi kewenangan dan otonomi yang lebih besar kepada otoritas pemerintahan di level kabupaten dan kota, tidak secara serta merta meningkatkan kemampuan dan kapasitas institusi, keuangan, teknik dan sumber daya manusia yang ada pada level kabupaten. Padahal banyak kota-kota kecil dan menengah yang terdapat di banyak kabupaten di Indonesia ini yang berupa kecamatan, bagian dari suatu kecamatan, atau gabungan dari bagian dari beberapa kecamatan. Tanpa upaya penguatan desentralisasi dan otonomi yang berupa suatu upaya "re-desentralisasi" beberapa urusan dan kewenangan pembangunan tertentu dari level kabupaten kepada level kota-kota kecil tersebut, dikhawatirkan bahwa persoalan-persoalan perkotaan yang terdapat di kawasan kota-kota kecil tersebut tidak dapat tertangani. Hal ini disebabkan karena institusi pada level kabupaten akan menjadi institusi yang bertanggung jawab dan mengawasi seluruh wilayah kabupaten, yang memiliki beberapa kota kecil yang berkembang dengan pesat, sehingga perhatiannya terhadap permasalahan yang terjadi di setiap kota kecil yang ada belum tentu dapat dilakukan secara

yang menjadi pasar potensial bagi produk-produk pertanian setempat. Dengan demikian, peranan kota-kota kecil dan menengah di wilayah kabupaten dalam melakukan pengintegrasian wilayah dapat dikembangkan tidak saja menjadi elemen-elemen pusat kegiatan sosial, namun juga menjadi elemen-elemen pengikat kegiatan ekonomi wilayahnya.

Untuk melakukan penguatan dan pengembangan kapasitas pengelolaan pembangunan seperti itu, maka perlu dikembangkan beberapa upaya. Pertama adalah melakukan peningkatan dan penguatan kapasitas institusi pembangunan di level kabupaten, selain agar mampu melakukan pengelolaan pembangunan ekonomi pertanian dan perdesaan juga perlu dikembangkan agar mampu melakukan pengelolaan pembangunan perkotaan di wilayahnya secara terintegrasi. Kedua, perlu dilakukan pengenalan dan pengembangan institusi pengelolaan pembangunan perkotaan, terutama pada kota-kota kecil dan menengah yang telah memiliki suatu batasan tertentu, misalnya memiliki jumlah penduduk lebih dari 30 atau 50 ribu jiwa atau lebih. Dan selanjutnya adalah pengembangan suatu saluran komunikasi pembangunan (*channel of communication*) antara institusi pembangunan kota di level kota-kota kecil dan menengah dengan institusi pembangunan wilayah di level kabupaten, agar pembangunan yang dilakukan di kedua level wilayah tersebut dapat dilakukan secara selaras dan terintegrasi.

Daftar Pustaka

- Badshah, Akhtar A., 1996, *Our Urban Future: New Paradigms for Equity and Sustainability*, Zed Books Ltd., London & New Jersey.
- Bai, X. (2007). Integrating Global Environmental Concerns into Urban Management: the scale and readiness arguments, in *Journal of Industrial Ecology*, Vol. 11, No. 2, pp. 15-29.
- BPS, 2000, *Penduduk Indonesia: Hasil Sensus Penduduk 2000, Angka Sementara Hasil Pengolahan Sampai Dengan 20 Desember 2000*, Jakarta, 36 halaman.
- BPS, 2002, *Pedoman Analisis Sensus Penduduk 2000*, Jakarta, 427 halaman.
- Cohen, Barney, 2004, « Urban growth in developing countries: a review of current trends and a caution regarding existing forecasts », *World Development*, vol. 32, n° 1, pp. 23-51.
- Colville, R.N., et al. (2001). The Transport Sector as a Source of Air Pollution, in *Atmospheric Environment*, Vol. 35, pp. 1537-1565.
- Cosgrove, William J and Rijsberman Frank R., 2000, *World Water Vision: Making Water Everybody's Business*, a report for World Water Council, Earthscan Publication Ltd., London.
- Davis, Kingsley (1955). « The origin and growth of urbanization in the world », *The American Journal of Sociology*, vol. 60, n° 5, World Urbanism, p. 436-437.
- Devas, Nick and Rakodi, Carole (1993a), « The urban challenge », in DEVAS N AND RAKODI C (ed.), *Managing fast growing cities: New approaches to urban planning and management in the Developing World*, Essex, Longman House.
- Devas, Nick and Rakodi, Carole (1993b), « Planning and managing urban development », in DEVAS N AND RAKODI C (ed.), *Managing fast growing cities: New approaches to urban planning and management in the Developing World*, Essex, Longman House.
- Finco, A. & Nijkamp, P. (2001). Pathways to Urban Sustainability, in *Journal of Environmental Policy & Planning*, Vol. 3, pp. 289-302.

- Firman, T. (2003). The Spatial Pattern of Population Growth in Java, 1990-2000: continuity and change in extended metropolitan region formation, in *International Development Planning Review*, Vol 25, No 1, pp.53-66.
- Firman, T. (2004). Demographic and Spatial Pattern of Indonesia's recent urbanisation, in *Population, Space and Place*, Vol 10, pp.421-434.
- Firman, Tommy (1992). « The spatial pattern of urban population growth in Java, 1980-1990 », *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, vol 28, n° 2, p. 95-109.
- Firman, Tommy (1997). « Land conversion and urban development in the Northern region of West Java, Indonesia », *Urban Studies*, vol 34, n° 7, p. 1027-1046.
- Ford, T. (1999). Understanding Population Growth in the Peri-Urban Region, in *International Journal of Population Geography*, Vol. 5, pp. 297-311.
- Friedmann, John et Wolff, G. (1982). « World cities formation: an agenda for research and action », *International Journal of Urban and Regional Research*, vol. 6, n° 3, p. 309-344.
- Jacques Véron. (2006). *L'urbanisation du Monde*, Paris, La Découverte.
- Laganier, Richard et al (2002). « Le développement durable face au territoire: éléments pour une recherche pluridisciplinaire », *Revue Développement Durable et Territoire*, Dossier 1 : Approches territoriales du Développement Durable, www.revue-ddt.org.
- Lemelin, André et Polèse, Mario (1995). « Développement économique, urbanisation et concentration urbaine : essai de synthèse », in POLESE, MARIO et WOLFE JEANNE M (éd), *L'Urbanisation des Pays en Développement*, Paris, Economica.
- Mardiansjah, Fadjar Hari and Setyo Adhi Waluyo, 2005, Urbanisation in District of (Kabupaten) Tegal and Their Challenges from the Perspective of Local Government Apparatus. (in Bahasa Indonesia) in *Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota*, Vol. 2, June 2005.
- Mardiansjah, Fadjar Hari, 2003, Analysis on Kampung Improvement Program for Jabotabek Urban Development, in *Jurnal Tata Loka*, Vol. 5, No. 4, November 2003.
- Mardiansjah, Fadjar Hari, 2003, Community Participation in Urban Poverty Alleviation (in Bahasa Indonesia), in *Jurnal Tata Loka*, Vol. 5, No. 3.
- Mardiansjah, Fadjar Hari, 2005a, Rurbanisation: the other challenge of urban development that should be awared (in Bahasa Indonesia) in *Buletin URDI*.
- Mardiansjah, Fadjar Hari, 2005b, The Characteristics of Urbanisation in Small and Medium Cities in Central Java (in Bahasa Indonesia) in *Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota*, Vol. 4, December 2005.
- McGee, T. & Yao-Lin, W. (1992), La Formation des Mégapoles en Asie, in *Mappe Monde*, Vol. 4, pp. 2-3.
- Murphy, P. (2000). Urban Governance for More Sustainable Cities, in *European Environment*, Vol. 10., pp. 239-246.
- Organization Nations Unites, 2004, *World urbanisation prospects : the 2003 revision*, New York, United Nations.
- Polèse, Mario et Wolfe, Jeanne M., éd. (1995). *L'urbanisation des pays en développement*, Paris, Economica.
- Potter, RB and Lloyd-Evans, S, 1998, *The city in the developing world*, Singapore, Adison Wesley Longman Singapore.

- Pugh, Cedric (1995). « Urbanization in developing countries », *Cities*, vol. 12, n° 6, p. 381-398.
- Reissman, Leonard (1964). *The urban process, cities in industrial societies*, Illinois, Glencoe.
- Rondinelli, D.A. (1986). Metropolitan Growth and Secondary Cities Development Policy, in *Habitat International*, Vol. 10, No. 12, pp. 263-271.
- Rondinelli, D.A. (1991). Asian Urban Development Policies in the 1990s: from growth control to urban diffusion, in *World Development*, Vol. 19, No. 7, pp. 791-803.
- Rotmans, J., & van Asselt, M.B.A. (2000). Towards an Integrated Approach for Sustainable City Planning, in *Journal of Multi-criteria Decision Analysis*, Vol 9, pp. 110-124.
- Sassen, Saskia (2001). « Cities in the global economy ». PADDISON R (Ed.), *Handbook of urban studies* (pp. 256– 272). London. Sage Publications.
- Satterthwaite, D. (1997). Sustainable Cities or Cities that Contribute to Sustainable Development?. in *Urban Studies*, Vol. 34, No. 10, pp. 1667-1691.
- Sharbatoghlie, Ahmad (1991). *Urbanization and regional disparities in post-revolutionary Iran*, Boulder, San Francisco, Oxford, Westview Press.
- Tisdale, Hope (1942). « The process of urbanization », *Social Forces*, vol. 20, n° 3, march, p. 311-316.
- UN Population Division (2005). *World urbanization prospects: the 2005 revision population database*, pada <http://esa.un.org/unup/p2k0data.asp>, diakses pada Januari 2007.
- Werlin, H. 1999. The Slum Upgrading Myth, in *Urban Studies*, Vol. 36, No. 9, pp. 1523-1534.
- Wilbanks, T.J. (1994). Presidential Address: "Sustainable Development" in Geographic Perspective, in *Annals of the Association of American Geographers*, Vol. 84, No. 4, pp. 541-556.